

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
AKAD 'ARIYAH BERSYARAT**

(Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods  
Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**EKO FIRMANTO**  
NPM. 1621030159

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'âmalah)



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
AKAD 'ARIYAH BERSYARAT**

(Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods  
Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**EKO FIRMANTO**

NPM. 1621030159

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'âmalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020M**

## ABSTRAK

Latar belakang dalam masalah ini adalah bahwa telah terjadi adanya sebuah akad '*ariyah* (pinjam meminjam) di UD Karya Mandiri Frozen Foods yang didalamnya mensyaratkan akad jual beli sehingga jika tanpa akad jual beli tersebut maka akad '*ariyah* (pinjam meminjam) menjadi batal.

3Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik dan pandangan hukum Islam terhadap '*ariyah* (pinjam meminjam) bersyarat di UD Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Sedangkan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah mengetahui bagaimana praktik dan pandangan hukum Islam terhadap '*ariyah* (pinjam meminjam) bersyarat di UD Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Kemudian untuk jenis penelelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk sifat penelitian, penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menjelaskan data yang terdapat dilapangan dan sekaligus penulis memberikan penilaian dari sudut pandang Islam. Adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di UD Karya Mandiri Frozen Foods, kemudian semua data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan mengenai praktik akad '*ariyah* (pinjam meminjam) bersyarat menurut pandangan hukum Islam. Adapun hasil penelitian dalam praktik '*ariyah* (pinjam meminjam) bersyarat di UD Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung bahwa akad pinjam meminjam tersebut mensyaratkan adanya akad jual beli yngag menyebabkan adanya akad pinjam meminjam tersebut digantungkan oleh akad jual belinya. akad bersyarat itu pun telah jelas adanya pelarangan oleh nabi didalam hadisnya dan beberapa ulama juga telah melarang adanya akad bersyarat apabila menghilangkan tujuan adanya akad itu sendiri. Dapat kita lihat dari permasalahan diatas bahwa pemilik UD Karya Mandiri Frozen Foods mengambil keuntungan pada akad yang bersifat *tabbaru'* dengan cara mensyaratkan adanya jual beli didalamnya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Firmanto

NPM : 1621030159

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD ‘ARIYAH BERSYARAT (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung) ”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2020

Demikian



**Eko Firmanto**

NPM. 1621030159



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Surajmim Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Eko Firmanto  
NPM : 1621030159  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Ariyah  
Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri  
Frozen Foods)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang,  
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hi. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.Ag.**

**NIP. : 197111061998032005**

  
**Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP: 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukraman 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
AKAD 'ARIYAH BERSYARAT STUDI KASUS DI UD. KARYA  
MANDIRI FROZEN FOODS"**, Oleh: **Eko Firmanto, NPM.  
1621030159**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan  
dalam sidang Munaqasyah Pada Hari Rabu Pukul 10.00-12.00 WIB,  
Tanggal 24 Juni 2020 di Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang : **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

Sekretaris Sidang : **Rudi Santoso, M.H.I**

Penguji Utama : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

Penguji Kedua : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

Penguji Ketiga : **Dr. Gandhi Lijorba Indra, M.Ag**



Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah,  
**Dr. M. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”  
(QS. Al-Maidah (5) : 2).

﴿٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S. An-Nisa (4).

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada bapak dan ibu tercinta (Dapit dan Aay) yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Adikku (Aini Sapitri) tersayang yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilanku, seluruh dosen dan civitas akademika kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.



## **RIWAYAT HIDUP**

Eko Firmanto dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 14 Maret 1998, anak pertama dari pasangan bapak Dapit dan ibu Aay. Eko Firmanto memiliki saudari kandung yaitu seorang adik perempuan yang bernama Aini Sapitri, adapun riwayat pendidikan Eko Firmanto adalah dimulai dari SDS Muhamadiyah Karang Maritim, kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di MTS SA Anwarul Hidayah Sungai Dua, kecamatan Kedondong, kabupaten Pesawaran pada tahun 2010-2013, dan melanjutkan SLTA di MA Al-Asy'ariyah Panjang, kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016, di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, April 2020  
Penulis,

**Eko Firmanto**  
NPM. 1621030159

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes* (Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)” dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman. Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah. Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*mu'âmalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan

penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibuk dosen Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.
6. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*) angkatan 2016, khususnya *Mu'âmalah* kelas J.
8. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah senantiasa memeberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah swt saya serahkan segalanya, mudahmudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

*Wasalamu 'alaikum, Wr, Wb.*

Bandar Lampung, April 2020  
Penulis,

**Eko Firmanto**  
NPM. 1621030159

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

## BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	12

## BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pinjam Meminjam dalam Islam ( ' <i>Ariyah</i> )	
1. Pengertian ' <i>Ariyah</i> .....	19
2. Dasar Hukum ' <i>Ariyah</i> .....	21
3. Hukum ' <i>Ariyah</i> .....	24
4. Rukun dan Syarat ' <i>Ariyah</i> .....	29

5. Macam-macam ‘ <i>Ariyah</i> .....	30
6. Status Barang Tanggungan.....	32
7. Berakhirnya akad ‘ <i>Ariyah</i> .....	35
<b>B. Konsep Akad Syari’ah</b>	
1. Pengertian Akad.....	36
2. Rukun dan Syarat Akad .....	38
3. Tujuan Akad .....	40
4. Macam-macam akad .....	46
<b>C. Akad Bersyarat dalam Islam</b>	
1. Pengertian Akad Bersyarat.....	52
2. Dasar Hukum Akad Bersyarat.....	54
3. Macam-macam Akad Bersyarat .....	56
4. Pendapat Para <i>Fuqaha</i> Mengenai Akad Bersyarat.....	60
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>69</b>

### **BAB III : LAPORAN PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum UD. Karya Mandiri Frozen Foods</b>	
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya .....	73
2. Produk UD. Karya Mandiri Frozen Foods .....	75
<b>B. Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat di UD. Karya Mandiri Frozen Foods</b>	
1. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	78
2. Syarat-Syarat Pinjam Meminjam .....	80
3. <i>Ijab Qabul</i> .....	82



## **BAB IV : ANALISA DATA**

- A. Praktik Pinjam Meminjam (*'Ariyah*) pada UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung..... 83
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Pinjam Meminjam (*'Ariyah*) pada UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung ..... 87

## **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 91
- B. Rekomendasi..... 92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.<sup>1</sup>

Hukum Islam menurut ahli ushul dapat diartikan sebagai berikut :

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُتَكَلِّفِينَ طَلْبًا أَوْ  
تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya : Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan perintah, pilihan atau ketentuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

<sup>2</sup> Abdul Wahav Khallaf, *Ushul Fiqh*, Cet X, (Dewan Dakwah Islam : Jakarta, 1972), h. 100.

Akad *'Ariyah* adalah pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan).<sup>3</sup>

Setiap perjanjian di dalam transaksi Islam tentu memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan Islam. Dan Mazhab Dzahiriyah menegaskan pula bahwa membuat syarat dalam transaksi itu dilarang kecuali syarat-syarat yang ada dalil yang melandasinya karena hukum-hukum akad dan konsekuensi hukumnya itu adalah tugas syariat ini bukan pihak yang mengaturnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas terhadap praktik akad *'Ariyah* bersyarat yang memiliki pengertian bahwa sesuatu peminjaman barang terhadap seseorang dengan syarat dikembalikan dengan barang dan bentuk yang sama dengan ketentuan serta hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 67

<sup>4</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 138

## B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadikan motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Secara Objektif

Bahwa pembahasan ini mudah dalam mencari referensi baik berupa buku-buku maupun *E-book*. Dan dapat dilihat juga bahwa dalam praktik peminjaman bersyarat ini terdapat masalah yaitu telah hilangnya esensi dari akad '*Ariyah*' itu sendiri karena tujuan dari peminjaman suatu barang adalah sebuah akad *Tabarru'* yang tidak ada di dalamnya ganti (imbalan).

### 2. Secara Subjektif

- a. Judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad '*Ariyah*' bersyarat sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'âmalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dan dalam penanggung jawaban amanah tersebut Allah pun telah memberikan aturan-aturan syariah sehingga manusia hidup dalam kedisiplinan dan juga teratur.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* pun berlaku pada setiap keadaan, tempat dan zaman baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kemampuan ajaran islam untuk menyesuaikan dan mampu untuk menghadapi perkembangan zaman yang sangat cepat berubah dan juga terhadap kebutuhan umat manusia, baik dalam permasalahan ibadah maupun muamalah.<sup>5</sup>

Aturan syariah Islam ini merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dan di dalam muamalah tersebut mencakup seluruh sisi kehidupan dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan dan politik bernegara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ruslan Abdur Ghofur, “Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII No. 1 (3 Juni 2015), h. 493

<sup>6</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: gema insani, 2001), h. 3



Islam pun sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an, sunah, maupun ijtihad para ulama yang berbicara mengenai perekonomian. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an justru berisi mengenai masalah ekonomi, bukan masalah ibadah *mahdah* atau akidah.<sup>7</sup>

Kegiatan muamalah dalam bidang perekonomian salah satunya adalah peminjaman, yang merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia karena manusia memang tidak dapat lepas dari transaksi tersebut. Pada dasarnya peminjaman adalah pembolean sesuatu kepada seseorang untuk dimanfaatkan dengan tanpa ganti (imbalan).<sup>8</sup>

Untuk menjamin keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِاِلْبَاطِلٍ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَتْ تَحِيْرَةً عَنْ تَرٰضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٥﴾

---

<sup>7</sup> Syamsul Hilal, "Urgensi *Qawa'id Al-Fiqhiyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 1 (1 Januari 2011), h. 2

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika , 1994) h. 136.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa' (4) : 29).

Tujuan utama adanya pinjam proses peminjaman adalah untuk menolong sesama. Sehingga ketika seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan membantu sesama dan tanpa adanya imbalan maka akan bernilai ibadah, namun jika pemberiannya tersebut bukan didasari oleh keinginan untuk menolong atau membantu sesama maka hukumnya tentu akan berbeda dan hal tersebut banyak terjadi disaat ini dimana perkembangan ekonomi selalu berubah-ubah dan berkembang pesat sehingga dalam ekonomi dan sosialisasi tentunya banyak perbedaan dengan hukum yang telah ada.

Peminjaman tersebut didasarkan dengan adanya firman

Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا  
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ

شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
 وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah (5) : 2)

Hukum peminjaman menurut hukum Islam pada dasarnya adalah diperbolehkan, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang sangat membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala yang besar apalagi jika peminjamannya tersebut dilandasi dengan tolong menolong dan rasa keikhlasan.

Peminjaman termasuk dalam salah satu akad *Tabarru'* yang memiliki esensi tolong menolong tanpa adanya imbalan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita semua memerlukan adanya peminjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan-aturan terhadap hal tersebut. Dengan tujuan agar

tidak merugikan salah satu pihak dan agar tercipta tatanan masyarakat yang peduli akan tolong menolong kepada orang yang sedang kesulitan dan kesusahan. Salah satu aturan itu adalah menurut Mazhab Maliki setiap syarat boleh disepakati dalam akad asalkan hal itu tidak bertentangan dengan *muqtadho akad* (tujuan akad). Yang dalam hal ini berarti tidak diperbolehkannya menarik keuntungan dari peminjaman tersebut karena hal itu akan merusak dari esensi akad tersebut yaitu tolong menolong dan tanpa mengharapkan imbalan karena pada dasarnya peminjaman merupakan bagian dari akad *tabarru'*.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang beragama islam maupun orang non muslim yang melakukan praktik peminjaman ini. dimanapun dan kapanpun kita sering mendengar transaksi tersebut dan bahkan melakukan transaksi tersebut. hal tersebut pun dapat disaksikan pada UD. Karya Mandiri Frozen Foods yang bertempat di Jl. Selat Malaka V Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Dalam pelaksanaan praktik peminjaman yang terjadi di UD Karya Mandir Frozen Foods dilaksanakan sebagai berikut : seorang *mu'ir* (orang yang meminjamkan) meminjamkan sebuah gerobak

---

<sup>9</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah .....*, h. 141

dagang kepada seorang *musta'ir* (peminjam). Dan *mu'ir* memberikan syarat yaitu *musta'ir* wajib membeli (akad jual beli) semua kebutuhan dagangnya yang dalam hal ini berupa produk siap masak yang sering dinamakan *frozen foods*. Dan dalam hal ini akan dicoba untuk menguraikan masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad *'Ariyah* Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, maka didalamnya akan terlebih dahulu dibuatkan fokus penelitian pada objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka kemudian tahap berikutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada adanya transaksi peminjaman gerobak yang mensyaratkan akad jual beli di dalamnya yaitu peminjam diwajibkan membeli produk makanan siap saji yaitu makanan beku atau sering disebut *frozen foods* yang dijual oleh UD Karya Mandiri Frozen Foods, dan akan ditinjau hukum akad tersebut secara hukum Islam. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung



### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik peminjaman (*'ariyah*) bersyarat di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik peminjaman (*'ariyah*) bersyarat di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ?

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik peminjaman (*'Ariyah*) bersyarat di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik peminjaman (*'Ariyah*) bersyarat di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

## G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan berguna untuk:

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai praktik akad peminjaman (*'ariyah*) bersyarat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung..

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana langsung melakukan penelitian ke lokasi yaitu pada UD. Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung mengenai praktik peminjaman (*'Ariyah*) bersyarat.dan penelitian ini juga menggunakan bahan kepustakaan (*Library research*) yaitu penelusuran kepustakaan, dimana memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yakni buku-buku, makalah, situs internet dan karya ilmiah lainnya.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menjelaskan data yang terdapat dilapangan, dan sekaligus akan memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang akad *'Ariyah* bersyarat yang terdapat pada UD. Karya Mandiri Frozen Foods. Dari pengolahan data tersebut akan dapat

diketahui dengan jelas mengenai hukum dari permasalahan tersebut.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para pihak dari akad *'Ariyah* tersebut yaitu pihak *musta'ir* (peminjam) dan *Mu'ir* (orang yang meminjamkan), hasil wawancara, serta observasi di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data yang tidak langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>11</sup> Pada data ini akan diusahakan untuk mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 6

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka- Cipta, 1993), h. 114.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>12</sup>

Adapun populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah para pihak dalam akad pinjam meminjam (*'ariyah*).

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>13</sup>

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara :

- 1) Menentukan *mu'ir* (orang yang meminjamkan) dan *musta'ir* (peminjam) yang akan dijadikan subjek penelitian dengan pertimbangan lokasi sekitar wilayah kecamatan panjang.
- 2) Menentukan *musta'ir* (peminjam) yang akan dijadikan subjek dengan pertimbangan lamanya meminjam dan menjualkan produk UD. Karya Mandiri Frozen Foods setidaknya telah 5 bulan.

#### b. Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel yang memenuhi kriteria. Populasi dalam penelitian ini adalah para

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 173.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 174

pihak yang melakukan peminjaman yang dalam hal ini adalah :

- 1) Bapak Kamim, sebagai pemilik dari UD. Karya Mandiri Frozen Foods dan *mu'ir* (orang yang meminjam).
- 2) Para *musta'ir* (peminjam), dalam hal ini adalah :
  - a) Bapak Imrondi
  - b) Bapak Rasyid.

#### 4. Metodologi Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian di UD Karya Mandiri Frozen Foods Kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara

kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>14</sup> proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak terkait dengan akad '*Ariyah* bersyarat tersebut yang dalam hal ini adalah *mu'ir* dan *musta'ir* yang terdapat di UD Karya Mandri Frozen Foods. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang faktual, menarik dan menimba kepribadian individu.<sup>15</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan catatan seperti buku, majalah, peraturan dan catatan-catatan lainnya.yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

---

<sup>14</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 107

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 96.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Editing

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>16</sup>

### b. Coding

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

### c. Sistematis

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

---

<sup>16</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h. 82



## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga diri sendiri dan orang lain mudah memahami.

Dalam menganalisa, peneliti menggunakan pendekatan nalar deduktif dan induktif, penalaran deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode deduktif yang digunakan dalam sebuah penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan dalam pencarian fakta. Sedangkan penalaran induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Peminjaman dalam Islam (*'Ariyah*)

###### a. Pengertian *'Ariyah*

Menurut bahasa, *'Ariyah* ialah (الْعَارِيَّة) berasal dari kata (عَارَ) yang memiliki arti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat, *'Ariyah* berasal dari kata (النَّعَاوُرُ) yang artinya sama hal itu dengan (التَّائُولُ أَوِ التَّائِبُ) yang berarti *saling menukar dan mengganti*, yakni dalam tradisi peminjaman.<sup>17</sup>

Menurut terminologi sebagaimana di kemukakan oleh para ulama fiqih *'Ariyah* dapat di artikan sebagai berikut:

1) Menurut ulama Hanafiyah :

تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ مَجَانًّا

“kepemilikan manfaat secara gratis”.

2) Menurut ulama Malikiyah

تَمْلِيكَ مَنَفْعَةٍ مُّؤَقَّتَةٍ بِلاَ عِوَضٍ

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 139.

“kepemilikan manfaat yang terikat oleh waktu tanpa adanya pengganti”.

3) Menurut ulama Syafi’i

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ

“kebolehan memanfaatkan barang dan zatnya barang tersebut utuh”.

4) Menurut ulama Hanabilah

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِ

“kebolehan manfaat sesuatu yang bernilai harta.”<sup>18</sup>

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang ‘Ariyah di atas, maka dapat dipahami bahwa ‘Ariyah adalah Peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Maka ketika ada suatu pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan di dalamnya, maka hal tersebut bukanlah ‘Ariyah karena salah satu ciri dari akad-akad *tabarru*’

---

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 51-52.

adalahny tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolong menolong.<sup>19</sup>

## b. Dasar Hukum ‘Ariyah

### 1) Al-Qur’an

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah (5) : 2).

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S. An-Nisa (4) : 58).

---

<sup>19</sup> K Lubis Suhrawardi , dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, ( Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Q.S. Al-Ma'un (107) : 7)

Ayat di atas menerangkan bahwa orang munafik memiliki sifat enggan tolong-menolong terhadap orang lain dengan barang berguna. Al-Qurthubi menjelaskan mengenai sebagian pendapat ulama bahwa kalimat الماعون sebagaimana terdapat dalam ayat di atas maknanya adalah 'Ariyah (Peminjaman).<sup>20</sup>

## 2) Hadis

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ»

Artinya : Hisyam bin 'Amar beliau berkata : Isma'il bin 'Ayyasy beliau berkata : Syurohbiil bin Muslim menuturkan kepadaku, Beliau berkata "saya mendengar dari abi umamah" beliau berkata: saya mendengar dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda : Al-'Ariyah

<sup>20</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah .....*, h. 53

(pinjaman) itu harus dikembalikan, *Al-Minhah* (Barang yang diambil manfaatnya)<sup>21</sup>

حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ  
يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ  
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:  
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
«إِذَا أَتَيْتَكَ رُسُلِي، فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا  
وِثْلًا ثَلَاثِينَ بَعِيرًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ  
مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟، قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ  
مُؤَدَّاةٌ»

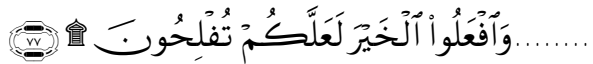
Artinya : Telah menceritakan Hiban bin Hilal, beliau berkata : bahwa telah menceritakan Hamam bin Yahya, beliau berkata: bahwa telah menceritakan Qotadah, dari Shofwan bin Ya'la bin Umayyah, dari bapaknya, beliau berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda kepadaku, “Apabila utusan-utusanku datang kepadamu, maka berilah mereka tiga puluh baju perang dan tiga puluh unta.” Lalu saya berkata: “Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang dikembalikan?, Rasul menjawab : “tentu itu pinjaman yang dikembalikan”<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Darul Ihya Al-Kutubi Al-'Arabiyyah) h. 801

<sup>22</sup> Abu Abdurrahman Ahmad, *As-Sunan Al-Kubra Linnisa'i*, Juz 5 (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 2001), h. 331

### c. Hukum *'Ariyah*

Mengenai hukum pelaksanaan *'ariyah* (pinjam-meminjam) di dalam syariat Islam Jumhur ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa hukum asal dari *'ariyah* (peminjaman) adalah sunnah (*nadb*).<sup>23</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt yang berbunyi:



Artinya : .... Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj (22) : 77)

Hukum meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudahan jika meminjamkannya jadi diharuskan kepada pemilik barang untuk meminjamkan barangnya. Contohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang telanjang, atau hanya memakai pakaian seadanya sehingga merasakan kedinginan. Maka, jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya hukumnya menjadi wajib karena orang tersebut bisa saja

---

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah ...*, h. 55

meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak dipinjami baju.

Mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang kafir.<sup>24</sup>

Terkadang pula hukumnya bisa menjadi haram, seperti meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang memakai pakaian ihram dan ibadah haji atau meminjamkan pisau untuk membunuh. Jadi *'ariyah* hukumnya dapat berubah sesuai keadaan saat itu yang mempengaruhinya.<sup>25</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat *'Ariyah***

##### **1) Rukun *'Ariyah***

Menurut mayoritas ulama Hanafiyah rukun *'ariyah* hanya membutuhkan ungkapan ijab dari peminjam saja, sedangkan Kabul dari orang yang meminjamkan tidak termasuk rukun karena cukup

---

<sup>24</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Peminjaman*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 7-8

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 42, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal. 323



dengan menyerahkan barang kepada peminjam barang hal tersebut berdasarkan dari *istihsan* (perbuatan yang dianggap baik oleh syara' dan adat kebiasaan).<sup>26</sup>

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, di dalam 'ariyah mensyaratkan adanya lafazh *shighat akad*, yakni ucapan serah terima atau sering disebut ijab kabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang tergantung pada adanya izin dari satu pihak.

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun 'ariyah ada empat, yaitu :

- a) *Mu'ir* (yang meminjamkan)
- b) *Musta'ir* (peminjam)
- c) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- d) *Shighat* (ungkapan ijab Kabul/serah-terima).<sup>27</sup>

## 2) Syarat 'Ariyah

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad 'ariyah sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 94

<sup>27</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz zain*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005), h. 262.

a) Syarat yang berhubungan dengan *mu'ir* (yang meminjamkan) di antaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Berakal dan *mumayyiz*. Baligh tidak menjadi syarat sah. Oleh karena itu, hukumnya sah anak kecil melaksanakan '*ariyah* asalkan ada izin dari orang tuanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i selain keduanya (berakal dan *mumayyiz*) juga ditambah dengan baligh. Sehingga '*ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.<sup>29</sup>
- (2) Orang tersebut tidak di-*mahjur* (di bawah perlindungan/pengawasan). Maka tidak sah '*ariyah* yang dilaksanakan di bawah perlindungan, seperti pemboros dan pailit.<sup>30</sup>
- (3) Orang yang meminjamkan merupakan pemilik manfaat barang yang akan dipinjamkan, maka sah meminjamkan barang

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), h. 250

<sup>29</sup> Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahibi Al-Arba'ah*, Juz 2, (Kairo: *Dar Al-Hadis*, 2004), h. 206

<sup>30</sup> *Ibid.*

sewaan dan barang wasiat karena mereka memiliki hak atas kepemilikan manfaat barang tersebut.<sup>31</sup>

b) Syarat yang berhubungan dengan *Musta'ir* (peminjam) diantaranya sebagai berikut:

(1) Orang yang meminjam harus jelas. maka tidak boleh apabila peminjam tersebut samar-samar.

(2) Peminjam harus orang yang mengerti dan cakap dalam mempergunakan barang yang dipinjam. Maka tidak boleh meminjamkan barang seperti mobil kepada anak kecil atau orang gila karena ketidak cakapan mereka dalam mempergunakan barang tersebut.<sup>32</sup>

c) Syarat yang berhubungan dengan *mu'ar* (barang yang dipinjam) diantaranya sebagai berikut:

(1) Dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya (zatnya). Oleh karena itu meminjamkan makanan hukumnya tidak sah. Karena makanan tidak bisa dimanfaatkan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 207

<sup>32</sup> *Ibid*.

tanpa merusak zatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

- (2) Mempunyai manfaat dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah menambahkan sekalipun tidak diperbolehkan memperjualbelikannya, seperti anjing untuk berburu dan kulit binatang sembelihan.

d) Syarat yang berhubungan dengan *Shighat* (ungkapan ijab Kabul/serah-terima).

- (1) Setiap ungkapan yang menunjukkan keridhaan pemilik dan kebolehan memanfaatkan barang tanpa adanya pengganti, baik dengan ucapan, perbuatan, isyarat, atau saling memberi. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah harus mutlak berbentuk ucapan, tidak boleh yang lainnya. Adapun

tulisan yang disertai niat dan isyaratnya orang yang tidak bisa berbicara hukumnya sah.<sup>33</sup>

#### **e. Macam-Macam ‘Ariyah**

secara umum macam-macam ‘Ariyah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

##### *1) Al-Ariyah Mutlak*

*Al-ariyah mutlak* adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunkannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.

##### *2) Al-Ariyah Muqayyad (pinjaman Terbatas)*

*Al-ariyah muqayyad* adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil

---

<sup>33</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ..... h. 58-59

manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut.<sup>34</sup>

Orientasi *'ariyah muqayyad* (pinjaman terbatas) antara lain:

- a) Apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain.
- b) Apabila orang yang meminjakan menegaskan adanya batas waktu dan tempat penggunaan. Maka peminjam harus menaatinya dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila peminjam melanggar batas tersebut, maka peminjam wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang pinjaman.
- c) Apabila pemilik barang mengatur batas maksimum barang yang diangkut oleh barang pinjaman misalnya seperti kendaraan. Maka apabila orang yang dipinjamkan melanggar, maka peminjam wajib

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.....*, h. 144

mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut.<sup>35</sup>

#### f. Status Barang Pinjaman

Status barang pinjaman memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama. Karena ada yang mengatakan bahwa barang pinjaman tersebut merupakan tanggungan (*dhaman*) atau hanya bersifat amanah bagi peminjam. Mazhab hanafiyah berpendapat, pinjaman adalah amanah bagi peminjam, bukan tanggungan (*dhaman*), sama halnya dengan *wadi'ah*, dan *ijarah* tidak dikenakan *dhaman* ganti rugi bagi peminjam apabila barang pinjaman rusak tanpa sengaja. Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi Saw:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: "لَيْسَ عَلَى  
الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغْلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى  
الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِّ ضَمَانٌ"

Artinya: Dari Anas ibn Sirin sesungguhnya Suraih berkata:

“tidak ada kewajiban ganti rugi bagi penerima titipan yang tidak sia-sia dan tidak ada kewajiban ganti rugi bagi orang

---

<sup>35</sup> Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba’ah”. *Jurnal Qowanin*, Vol. 02 No. 2 (Juli 2018), h. 8

yang meminjam yang tidak melakukan sia-sia kewajiban ganti rugi”.<sup>36</sup>

Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyah berpendapat pinjaman adalah tanggungan (*dhaman*) untuk benda-benda yang dapat disembunyikan, seperti pakaian, perhiasan apabila benda tersebut rusak dan tidak ada saksi. Menurut ulama Malikiyah, apabila peminjam memakai barang pinjaman yang mungkin dapat dikurangi nilai barangnya, seperti pakaian, peminjam menanggung kerugian dan mengganti kerusakan barang tersebut.

Menurut ulama malikiyah, untuk barang yang tidak bisa disembunyikan seperti rumah, hewan apabila rusak atau hilang pada saat dimanfaatkan, peminjam tidak dikenakan ganti rugi. Apabila barang pinjaman hilang atau hancur, peminjam dapat membuktikan bahwa kerusakan atau hilangnya barang tersebut di luar kemampuannya, maka peminjam tidak harus mengganti kerusakan atau hilangnya barang tersebut.

Mazhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa pada prinsipnya tidak ada tanggung jawab bagi peminjam untuk

---

<sup>36</sup> Abu Bakar Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra, Juz 6*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 2003), h. 149



menganti rugi apabila barang tersebut digunakan sesuai izin dan ketentuan yang diatur dari pemilik barang. Namun, apabila peminjam menggunakan barang tersebut di luar izin dan ketentuan yang diatur dari pemilik barang. Maka peminjam harus mengganti kehilangan ataupun kerusakan pada barang pinjaman.

Kesimpulannya akad '*ariyah* dapat berubah dari amanah menjadi *dhamanah* apabila:

- 1) Barang yang dipinjam ditelantarkan oleh peminjam.  
Artinya barang tersebut diletakan di sebuah tempat yang dapat dengan mudahnya diambil oleh pencuri.
- 2) Barang pinjaman yang dalam waktu peminjaman/pemanfaatnya tidak mendapatkan pemeliharaan/perawatan sehingga barang tersebut menjadi rusak dan lapuk.
- 3) Peminjam menggunakan barang yang dipinjam tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau tidak sesuai dengan adat kebiasaan.

- 4) Peminjam menyalahi cara pemeliharaan barang sehingga barang tersebut menjadi mudah rusak karena salah dalam pemeliharaannya.<sup>37</sup>

**g. Berakhirnya Akad ‘Ariyah**

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya waktu yang sudah disepakati khusus dalam akad peminjaman yang dibatasi oleh waktu (*muqayyad*).
- 2) Pihak yang meminjamkan barang tersebut (*mu'ir*) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan (*musta'ir*) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- 3) Hilang akal nya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
- 4) Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.

---

<sup>37</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 174-176.

- 5) Rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dengan adanya keharusan untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.<sup>38</sup>

## **2. Konsep Akad Syari'ah**

### **a. Pengertian Akad**

Manusia dalam menjalankan bisnisnya harus memperhatikan satu hal yang terpenting yang wajib diketahui yaitu mengenai akad. Karena akad sangat berpengaruh bagi kita yang selalu berada dalam dunia bisnis karena akad itu sendiri merupakan komponen penting. Apabila kita tidak mengetahui mengenai akad dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana akad yang diperbolehkan dan akad yang dilarang. Mengenai pengertian Akad itu sendiri menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata (العقد) yang berarti mengokohkan, menjamin, dan berjanji. Sedangkan pengertian akad menurut istilah, para ulama fiqh menjelaskan banyak pengertian, sebagaimana salah satunya yang telah dikemukakan oleh Nazih Hammad sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,..... h. 63.

إِنْشَاءُ التَّصَرُّفِ الْمَبْنِيِّ عَلَى تَصْمِيمٍ وَ عَزْمٍ أَكِيدٍ  
سَوَاءً اسْتَبَدَّ بِهِ وَ أَمْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ

Artinya : tindakan yang didasarkan kepada ketetapan hati dan tekad yang kuat, baik dilakukan oleh seorang atau lebih.

Sejalan dengan Nazih Hammad di atas, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan akad dengan :

رَبْطٌ بَيْنَ كَلَامَيْنِ يَنْشَأُ عَنْهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ  
بِالتَّزَامِ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا

Artinya : menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat kepada kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Secara umum akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai yang bersifat mengikat para pihak di dalamnya.

Secara khusus akad memiliki arti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan

---

<sup>39</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,.....h. 1-2

*kaful* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad merupakan sebuah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>40</sup>

## **b. Rukun dan Syarat akad**

### **1) Rukun Akad**

Rukun merupakan komponen penting yang membentuk sesuatu sehingga hal tersebut dapat terwujud karena adanya rukun yang membentuknya. Rukun-rukun akad adalah antara lain :

- a) *Aqid* adalah orang yang terlibat di dalam akad. Dengan syarat orang tersebut telah memiliki kecakapan hukum dan perbuatannya dianggap sah menurut syariah.
- b) *Ma'qud 'alaih* merupakan benda-benda yang diakadkan, seperti benda dalam jual beli, gadai dan *'ariyah*.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 72

- c) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud dari adanya akad tersebut, berbeda akad tentu akan berbeda pula tujuan akad tersebut.
- d) *Shighat* adalah ijab dan kabul. Dan dalam *Shighat* harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh berbeda lafaznya. Menurut sebagian ulama, ijab adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya. Sedangkan kabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuan terhadap pihak lain tersebut.<sup>41</sup>

#### 1) Syarat Akad

Syarat merupakan suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi di dalam akad antara lain :

- a) Para pihak yang terlibat di dalam akad harus memiliki kecakapan dalam hukum dan mampu mengemban akad tersebut sehingga apabila akad

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, .....,h. 47

sudah berjalan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut.

- b) Benda yang dijadikan objek akad tidak boleh sesuatu yang dilarang dalam Islam, seperti babi, bangkai dan hasil curian.
- c) Akad yang digunakan bukan akad yang dilarang dalam Islam. Seperti adanya riba dalam akad tersebut.
- d) Akad tersebut menimbulkan manfaat dan faidah bagi para pihak.
- e) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum akadnya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

### **c. Tujuan Akad**

Tujuan akad merupakan maksud utama disyariatkannya akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan akad jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan perintah

Allah yang dijelaskan di dalam surat *Al-Maidah* yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. *Al-Maidah* (5) : 1)

Firman tersebut ditafsirkan oleh para ulama tafsir bahwa kata *al-‘aqdu* (akad) sama dengan *al-‘ahdu* (janji). Akad dalam penjelasan ayat tersebut berhubungan dengan akad Allah dan hambaNya dan akad manusia dengan sesama manusia. Jadi, dari ayat ini Allah telah memerintahkan kita untuk menunaikan setiap akad baik yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Namun, akad yang wajib ditunaikan ialah akad yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, hadis, maupun *ijma’*. jika bertentangan dari hal tersebut maka akad itu telah melanggar apa yang disyariatkan dalam Islam dan menjadikan akadnya tidak sah.



Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Atas dasar itu, semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* adalah tidak sah dan karena itu tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Misalnya, menjual barang yang diharamkan seperti minuman keras. Jika hal itu terjadi, dalam pandangan hukum islam akibat hukumnya tidak tercapai,. Jelasnya, menurut hukum Islam jual beli atas barang yang diharamkan tersebut tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan barang kepada pembeli dan kepemilikan harga barang kepada penjual.<sup>42</sup>

Berikut ini akan dijelaskan tujuan dari setiap akad :

- 1) Tujuan ***Bai'***: memberikan (*tamlik*) suatu barang dengan harga yang telah ditentukan untuk waktu yang tidak terbatas.
- 2) Tujuan ***Ijarah***: memberikan (*tamlik*) jasa dengan upah/balasan secara temporal.
- 3) Tujuan ***Qardh***: memberikan (*tamlik*) barang berupa harta *mitsli* dan bisa dikonsumsi dengan tujuan sosial

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,.....h.89-90

(menolong) dan dikembalikan (dibayar) dengan barang sejenis pada waktu yang disepakati kedua belah pihak.

- 4) Tujuan **Hibah**: memberikan (*tamlik*) harta kepada orang lain (Cuma-Cuma) tanpa mengharapkan imbalan kembali.
- 5) Tujuan **Rahn**: menahan barang sebagai jaminan yang bisa diambil semuanya atau sebagiannya, jika pembeli tidak melunasi kewajibannya.
- 6) Tujuan **Kafalah**: menjamin hutang orang lain untuk melunasi hutangnya.
- 7) Tujuan **Hawalah**: mengalihkan hutang dari pihak yang berhutang kepada orang yang berpiutang kepadanya.
- 8) Tujuan **Wakalah**: memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan kontrak atas nama dirinya.
- 9) Tujuan **'Ariyah**: meminjamkan manfaat suatu barang kepada orang lain tanpa mengurangi zat barang tersebut secara Cuma-Cuma dan dikembalikan sesuai waktu yang disepakati.
- 10) Tujuan **Mudharabah**: kerja sama dalam sebuah usaha dengan adanya kontribusi modal dari satu pihak dan

*skill*/keahlian di pihak lain dan adanya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

- 11) Tujuan ***Syirkah***: kerja sama dalam sebuah usaha dengan cara kontribusi yang sama/berbeda di dalam modal dan keahlian dan adanya pembagian keuntungan dan kerugian kepada para pihak yang bekerjasama (*profit and loss sharing*).
- 12) Tujuan ***Wadiah***: meminta bantuan kepada orang lain untuk menjaga hartanya (menitip).
- 13) Tujuan ***Iqalah***: kesepakatan pihak akad untuk mem-*fasakh* akad yang telah lalu antara keduanya.
- 14) Tujuan ***Ibra'***: menggugurkan haknya terhadap orang lain.

Berdasarkan target dan tujuannya, akad itu dibagi menjadi beberapa rumpun akad. Beberapa akad menjadi bagian lebih dari satu rumpun karena kesamaan tujuan akadnya. Rumpun-rumpun tersebut sebagai berikut:

- 1) Rumpun akad ***Mu'awadhat*** seperti akad *bai'* dan akad *ijarah* bertujuan untuk memberikan barang atau manfaat dengan imbalan harga atau upah.

- 2) Rumpun akad ***Tabarru'at*** seperti akad *qardh*, *'ariyah* dan *hibah* bertujuan untuk memberikan atau meminjamkan (dengan Cuma-Cuma) harta kepada orang lain.
- 3) Rumpun akad ***Tautsiqat*** seperti seperti akad *rahn*, *kafalah* dan *hiwalah* bertujuan agar pemberi pinjaman bisa mencairkan piutangnya.
- 4) Rumpun akad ***Ithlaqat*** seperti akad *wakalah* bertujuan untuk memberikan kuasa atau kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang diteentukan oleh pemberi kewenangan.
- 5) Rumpun akad ***Musyarakat*** seperti akad *mudharabah*, *syirkah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *mukhabarah* bertujuan agar terjalinnya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan (bagi hasil)
- 6) Rumpun akad ***Al-Hifdz*** seperti akad *wadiah* dan *hirasah* bertujuan untuk menjaga harta dari seseorang yang memberikan amanat kepadanya.

- 7) Rumpun akad ***Isqathat*** seperti akad *iqalah* dan *ibrai* bertujuan untuk menggugurkan sebagian haknya terhadap orang lain.<sup>43</sup>

#### **d. Macam-macam Akad**

Beberapa ulama berpendapat bahwa akad dibagi dan ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari keabsahannya menurut hukum Islam, akad terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

##### **1) Akad Shahih**

Akad sah merupakan akad yang sudah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah sahnya seluruh akibat hukum yang timbul dari akad itu dan para pihaknya menjadi terikat di dalamnya.

Mahzab Hanafiyah berpendapat bahwa akad shahih terbagi menjadi dua macam<sup>44</sup>, yaitu:

- a) Akad mafiz (sempurna untuk dilakukan) ialah akad yang rukun dan syarat nya langsung dipenuhi tanpa adanya halangan untuk melakukannya.

---

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,.....h. 45-46

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 20.

- b) Akad mawquf ialah akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang cakap dalam hukum, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan akad tersebut sehingga menguasakannya kepada seseorang seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

jika dilihat dari aspek mengikat atau tidaknya akad yang shahih itu, ulama fiqh telah membagi hal tersebut pada dua macam, yaitu :

- a) Akad yang memiliki sifat mengikat para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak diperkenankan membatalkan akad tersebut tanpa adanya izin dari pihak lain, seperti akad sewa menyewa dan akad jual beli.
- b) Akad yang tidak memiliki sifat mengikat para pihak-pihak yang ada di dalam akad, seperti akad '*ariyah* dan akad *wakalah*.

#### 1) Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih ialah akad yang memiliki kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut

menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih menurut ulama mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a) Akad Bathil

Akad bathil ialah akad yang di dalamnya tidak terpenuhinya salah satu rukunnya atau adanya larangan yang jelas dari syara'. Misalnya, jual beli yang terdapat unsur *gharar* atau transaksi yang di dalamnya terdapat riba sehingga transaksi-transaksi tersebut menjadi tidak shahih.

b) Akad Fasid

Akad fasid ialah akad yang pada pokoknya disyariatkan, namu, ada ketidakjelasan pada sifat yang diakadkan. Misalnya, menjual kendaraan atau bangunanyang tidak dijelaskan jenis, bentuk, dan tipe objek yang akan dijual, atau tidak disebut merek kendaraan yang dijual, sehingga mengakibatkan adanya perselisihan antara para pihak yang berakad.

### 3. Akad Bersyarat dalam Islam

#### a. Pengertian Multi Akad

Akad bersyarat merupakan salah satu dari multi akad sehingga akan lebih baik apabila menerangkan terlebih dahulu mengenai multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah *fiqh* kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Berdasarkan pemahaman tentang makna akad dan multi (*murakkab*), maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang



tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>45</sup>

## **b. Macam-macam Multi Akad**

Al- Imrani membagi multi akad dalam empat macam yaitu :

### **1) Akad Bergantung/akad bersyarat**

Akad bersyarat adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.

### **2) Akad Berkumpul**

Akad terkumpul merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bula dengan harga lima ratus ribu rupiah” multi akad model ini dapat terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda didalam satu akad terhadap dua

---

<sup>45</sup> Yosi Aryanti, “*multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah*”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember 2016), h. 179

objek dengan dua harga atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

### 3) Akad berbeda

Akad berbeda adalah multi akad yang terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagian. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.

### 4) Akad sejenis

Akad sejenis merupakan akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya seperti akad jual beli dan akad jual beli atau dari akad jual beli dan akad sewa.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Yosi Aryanti, “*multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah*”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember 2016), h. 179-180

### c. Pengertian Akad Bersyarat

Akad bersyarat atau dalam Islam disebut dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* termasuk dari salah satu jenis dari beberapa transaksi multi akad (*hybrid contract*) yang sekarang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian manusia yang semakin maju dan beranekaragam. *al-'uqûd al-mutaqâbilah* yang berasal dari kata *Taqâbul* yang menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua menggantungkan/mensyaratkan adanya akad pertama, yang mengakibatkan akad kedua sebagai syarat ada atau tidaknya akad pertama dan hal tersebut menjadi timbal balik dari kedua akad itu. Dengan kata lain, akad satu bergantung atau menjadi syarat dengan akad lainnya.<sup>47</sup>

Pengertian akad bersyarat jika diambil dari pengertian multi akad yang dikemukakan oleh Al-Imrani ialah sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> Hasanudin Maulana, “*multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia*”. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 9 Desember 2010, h. 126

مَجْمُوعَةُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّتِي يَشْمَلُ  
عَلَيْهَا الْعَقْدُ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ أَوْ التَّقَابُلِ  
بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ جَمِيعُ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامِ الْمُتَرْتِبَةِ  
عَلَيْهَا بِمُثَابَةِ أَثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ

Artinya: Kumpulan sejumlah akad maliyah yang beragam yang terdapat dalam sebuah transaksi baik secara gabung (al-jam') ataupun secara timbal balik (al-taqabul) yang mana seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu dianggap seperti akibat dari akad yang satu.<sup>48</sup>

Multi akad seperti ini ulama telah membahas permasalahan ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*, dan akad *mu'awadhah* dengan akad *mu'awadhah*. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih". (Makalah disampaikan pada *acara Diskusi Hukum* yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018), h. 2

<sup>49</sup> Hasanudin Maulana, "*multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia*" ....., h. 126

#### d. Dasar Hukum Akad Bersyarat

##### 1) Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ  
لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5) : 1)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4) : 29)

## 2) Hadis

حَدَّثَنَا حَسَنُ وَ أَبُو النَّضْرِ وَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ  
 قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سَمَاكٍ عَنْ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ  
 قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي  
 صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hasan, Abu An-Nadhar, dan Aswad bin 'Amir mereka berkata bahwa Syarik Telah menceritakan kepada kita dari samak dari 'Abdur Ar-Rohman bin Mas'ud dari bapaknya beliau berkata bahwa Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad<sup>50</sup>

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَعٍ،  
 وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. وَلَا تَبْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"  
 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَدِيثٌ  
 حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya : Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dari Nabi Saw, sesungguhnya beliau bersabda : tidak dihalalkan *salaf* dan jual beli, tidak dhalalkan dua syarat dalam satu jual beli, tidak dihalalkan keuntungan selama

<sup>50</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, jilid. 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah ), h. 324

barang belum dalam tanggungan, dan tidak dihalalkan menjual apa yang bukan milikmu.<sup>51</sup>

#### e. Macam-macam Akad Bersyarat

- 1) Akad *mu'awadhah* disyaratkan dengan akad *tabarru'* atau sebaliknya.

Contoh pertama dari akad bersyarat jenis ini adalah akad *qardh* (hutang piutang) dengan syarat akad *bai'* (jual beli), seperti si A menghutangkan uang kepada si B dengan mensyaratkan kepada si B untuk membeli barang yang dijual oleh si A. Para ulama menyepakati bahwa akad jenis ini tidak sah, karena akad *qardh* (hutang piutang) adalah akad *tabarru'*. Maka masuknya akad *bai'* (jual beli) kepada *qardh* akad mengubah akad *qardh* tersebut menjadi akad *mu'awadhah* dan akad berubah menjadi akad riba.

Contoh kedua dari akad bersyarat jenis ini ialah akad *bai'* dengan mensyaratkan adanya akad hibah atau akad *tabarru'* lainnya, seperti si A menjual barang kepada si B dengan mensyaratkan kepada si B adanya hadiah yang harus diberikan kepada si A, atau seperti si

---

<sup>51</sup> Abdurrahman bin Hasan, *Al-Iman wa Al-Roddu'ala Ahli Al-bad'i*, Jilid 1 (Riyadh : Darul 'Ashimah, 1992), h. 93

A menjual motor kepada si B dengan mensyaratkan bisa memakai motor tersebut dalam jangka waktu tertentu. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi jenis ini tidak sah untuk dilaksanakan karena adanya penghilangan tujuan akad dan karena akad ada ketidakpastian harga dan jumlah yang dibayarkan pihak kedua.

2) Akad *mu'awadhah* disyaratkan dengan akad *mu'awadhah*

Contoh dari akad bersyarat jenis ini ialah akad jual beli disyaratkan dengan akad jual beli, seperti si A akan mau menjual barangnya kepada si B apabila si B mau menjual barangnya kepada si A, atau si A mau menjual barangnya kepada si B dengan mensyaratkan si B menyewa barang dari si A. Mengenai akad jenis ini terdapat dua pendapat para ulama yaitu sebagai berikut:

- a) Pendapat pertama berpendapat bahwa transaksi jenis ini dilarang. Ini adalah pendapat para ulama Syafi'i, Hanafi, dan juga hanbali, mereka berpendapat dengan menggunakan dalil hadis yang mengatakan adanya pelarangan terhadap dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dengan



menegaskan bahwa adanya syarat *mu'awadhah* di dalam akad *mu'awadhah* telah termasuk kedalam hadis nabi yang melarang dua akad jual beli di dalam satu akad jual beli.

- b) Pendapat kedua menyatakan kebolehannya bentuk transaksi akad *mu'awadhah* dengan akad *mu'awadhah* lainnya. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Maliki, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka berpendapat menggunakan kaidah fiqh bahwa hukum asal dalam muamalah itu boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

3) Akad *tabarru'* disyaratkan dengan akad *tabarru'*

Contoh pertama dari transaksi ini ialah akad *qardh* disyaratkan dengan akad *qardh*. Transaksi ini terdapat dua bentuk yang berbeda, yaitu:

- a) A menghutangkan uang kepada si B dengan disyaratkan bahwa si A akan menghutangkan uang lagi kepada si B dilain waktu.
- b) A menghutangkan uang kepada si B dengan disyaratkan si B menghutangkan uang kepada si A.

Pada bentuk yang pertama, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap sah. Sedangkan bentuk kedua para ulama sepakat di dalam pelarangannya , karena rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ  
أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:  
«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبَاً»

Artinya: telah menceritakan kepada kita Abu Bakar, beliau berkata: bahwa telah menceritakan kepada kita Hafsh, dari Asy'as, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, beliau berkata : “Setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat (keuntungan), maka itu riba”.<sup>52</sup>

Contoh kasus yang kedua dari bentuk ini adalah akad *qardh* dengan akad hibah atau akad *tabarru'* lainnya selain *qardh*, seperti si A memberikan hutang uang kepada si B dengan syarat si B memberikan hadiah kepada si A , atau si B meminjamkan barang kepada si A dan sebagainya. Para ulama mengatakan bahwa transaksi bentuk ini dilarang karena terdapat manfaat bagi orang

---

<sup>52</sup> Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Kitab Al-Mushonif fii Al-Ahadis wa Al-Asar*, Juz 4, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1988), h. 327

yang menghutangkan dan setiap hutang yang mendatangkan manfaat hukumnya riba.

Dari pembahasan tersebut dapat kita ketahui bahwa mengenai hukum syarat akad dengan akad lainnya tergantung pada jenis akad yang menjadi syarat untuk akad pertama. Dengan demikian, mengenai pembahasan lebih lanjut dan rinci mengenai akad yang mempunyai syarat dengan akad lain memerlukan pembahasan yang lebih detail dan khusus tergantung akad apa yang disyaratkan terhadap akad lainnya dan sehingga akhirnya memungkinkan menghasilkan hukum yang berbeda-beda dari setiap akad tersebut.<sup>53</sup>

#### **f. Pendapat Para *Fuqaha* Mengenai Akad Bersyarat**

Mengenai multi akad, kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan nabi menggabungkan *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang kental dengan nuansa dan upaya untung rugi,

---

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih". (Makalah disampaikan pada *acara Diskusi Hukum* yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018), h. 6-8

sedangkan *salaf* adalah kegiatan social dengan mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Dan Ibnu Taimiyah didalam kitabnya *Al-Qowa'id Al-Nuroniyyah* berkata : “tidak boleh menggabungkan antara transaksi komersil dengan transaksi sosial, karena sebuah transaksi sosial jika dilakukan untuk tujuan komersil, maka hakikatnya tidak ada yang disebut transaksi sosial secara mutlak, dan menjadi bagian dari imbalan komersil”.<sup>54</sup>

Adapun Mengenai akad bersyarat, Ibn Al-Qayyim berpendapat bahwa setiap akad dan syarat selagi belum ada keterangan yang jelas mengenai keharamannya, maka diperbolehkan karena asal hukum di dalam permasalahan muamalah selagi tidak ada penjelasan yang mengharamkan. Maka, dihukumi boleh.<sup>55</sup> Namun menurut pendapat beberapa mazhab, mereka berbeda-beda dalam menyikapi syarat dalam suatu akad. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Yosi Aryanti, “*multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah*”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember 2016), h. 183.

<sup>55</sup> Muhammad Maksum, “*Model-Model kontrak dalam Produk Keuangan Syariah*”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII No. 1 (1 Juni 2014), h. 53

a. Mazhab Dzahiriyah

Mazhab Dzahiriyah menjelaskan bahwa dalam membuat syarat dalam transaksi itu dilarang kecuali syarat-syarat yang ada dalil yang menjadi landasan terhadap hal tersebut karena hukum-hukum akad dan konsekuensi hukumnya itu adalah tugas syariat ini bukan para pihak akad yang mengaturnya.<sup>56</sup>

Dalil yang menjadi penguat dari pendapat Mazhab Dzahiriyah adalah hadis nabi yang mengatakan:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ:  
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَاعِي  
فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَنْاسٍ  
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ

---

<sup>56</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,.....h. 138

اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ  
شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah telah mengabarkan kepadanya, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya "Tebuslah dan memerdekakanlah ia, karena hak perwalian itu bagi orang yang memerdekakan." Setelah itu Rasulullah berdiri sambil bersabda: "apa urusan orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada di kitabullah. Barangsiapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka ia tidak berhak mendapatkannya, walaupun dia mensyaratkan seratus kali, karena Syarat Allah lebih berhak untuk dilaksanakan dan lebih kuat."<sup>57</sup>

b. Mazhab Syafi'iyah

Adapun cara berpikir dari Mazhab Syafi'iyah dalam menanggapi permasalahan ini termasuk yang paling dekat dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab Dzahiriyah. Bedanya adalah, Mazhab Syafi'i menggunakan metode *menta'lil* (mengambil *'illat*) hukum dan mazhab Syafi'i berdalil dengan *qiyas*. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam membuat syarat dalam akad transaksi itu dilarang kecuali tiga jenis syarat, yaitu:

---

<sup>57</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid. 2 (Beirut: Darul Ihya Al-Turatsi Al-'Arabi), h. 1141

- 1) Syarat yang menjadi tujuan akad (*muqtadho akad*).
- 2) Syarat yang disebutkan dalam nash (*termanshus*), seperti jual beli dengan syarat ada *khiyar* atau jual beli dengan syarat modal dibayar tidak tunai atau dengan syarat ada penjamin (*kafil*) atau jaminan (*rahn*).
- 3) Syarat yang merupakan kewajiban untuk menentukan spesifikasi tertentu dalam objek akad, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tanah itu layak untuk ditanami.<sup>58</sup>

c. Mazhab Hanafiyah

Cara pandang Mazhab Hanafi lebih longgar dibandingkan Mazhab Dzahiriyah dan Mazhab Syafi'iyah walaupun prinsip yang mereka gunakan merupakan prinsip *Al-ashlu fi asy syuruth at taqyid* (pada prinsipnya, setiap kewenangan pihak akad dalam membuat kesepakatan akad itu terbatas). Menurut mereka syarat yang dapat dikatakan syarat yang shahih adalah :

---

<sup>58</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, .....h. 138-139

- 1) Syarat yang sesuai dengan *muqtadho al-'aqd* (tujuan akad), seperti syarat pembeli menyerahkan harga barang atau pembeli mensyaratkan barang itu dikembalikan jika ditemukan kecacatan.
- 2) Syarat yang sesuai dan memperkuat tujuan akad (*muqtadho al-'aqd*), seperti syarat adanya *rahn* atau *kafalah* atau *hawalah*.
- 3) Syarat yang termasuk seperti syarat adanya *khiyar* atau harga dibayar tidak tunai.
- 4) Syarat yang didasarkan kepada *'urf* (tradisi pasar) walaupun bukan bagian dari *muqtadho al-'aqd* (tujuan akad) dan tidak adanya nash yang menyebutkannya hal tersebut, seperti pembeli yang mensyaratkan agar penjual memperbaiki barang dalam waktu tertentu sejak akad disepakati.

Hanafiyah tidak membolehkan selain empat hal di atas, jika syarat tersebut mencakup hal-hal yaitu mensyaratkan tambahan manfaat bagi salah satu pihak atau selain pihak akad seperti penjual mensyaratkan dalam akad boleh memanfaatkan barang yang dijualnya dalam waktu tertentu, atau mensyaratkan pembeli rumah



untuk tidak mengeluarkan penyewa rumah yang dibelinya.

Menjadi catatan penting, bahwa kaidah '*urf*' yang dijadikan dasar bagi mazhab Hanafiyah ini telah memperluas wilayah syarat yang diperbolehkan sehingga mencakup membolehkan hal-hal yang dilarang selama tidak ada nash yang melarangnya. Maksudnya syarat dalam akad boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pembuatan syarat selama syaratnya bukan merupakan sesuatu yang dilarang seperti menjual sesuatu yang haram.

Kesimpulan pendapat mereka, bahwa seluruh syarat yang telah biasa ('*urf*') dipergunakan di masyarakat itu dibolehkan dengan dalil *istihsan*, walaupun dalil tersebut menyalahi *muqtadho al-'aqd* karena adanya '*urf*' tersebut berarti syarat fasid tersebut tidak mengakibatkan perselisihan. Hal ini menjadi '*illat*' dibolehkannya syarat-syarat tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 139-140

d. Mazhab Maliki

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab Malikiyah setiap syarat itu diperbolehkan untuk disepakati dalam akad kecuali dua hal:

- 1) Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad (*muqtadho al-'aqd*) yang menyebabkan pelaku akad tidak berhak memiliki barangnya. Seperti syarat tidak boleh menjual barang beberapa waktu.
- 2) Syarat yang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah akad. Seperti syarat yang menyebabkan kepada *jahalah* atau *gharar*.<sup>60</sup>

e. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim adalah Mazhab yang paling longgar dalam masalah ini. Menurut mereka, pada dasarnya setiap syarat itu hukumnya boleh dan sah kecuali beberapa syarat

- 1) Syarat yang bertentangan dengan *muqtadho al-'aqd* sehingga tujuan akad menjadi sulit tercapai. Seperti dalam akad jual beli, pembeli tidak boleh menjual

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 141

barang secara mutlak atau dalam akad sewa, penyewa tidak boleh menyewakan objek sewa kepada orang lain atau tidak boleh menghibahkannya kepada orang lain.

- 2) Syarat yang dilarang atau melanggar ketentuan fikih, seperti *shafqataini fi shafqah (two in one)*. Diantara contohnya adalah salah seorang pihak akad mensyaratkan kepada mitranya untuk melakukan akad lain, misalnya penjual menjual sesuatu kepada seorang pembeli dengan syarat pembeli meminjamkan barang tertentu kepadanya atau dengan syarat pembeli menjual barang tersebut kepadanya atau menghibahkan barang tertentu kepadanya.

Jika kita pahami pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat Mazhab jumhur ulama mereka membatasi syarat-syarat yang dilarang hanya terbatas pada syarat-syarat yang bertentangan dengan *muqtadho al- 'aqd* (tujuan akad).

Dengan jelas dan tegas, Mazhab Hanbali memberikan batasan, syarat itu dikategorikan

bertentangan dengan akad apabila menghilangkan atau bertentangan dengan maksud dan tujuan akad tersebut, seperti pembeli tidak bisa memanfaatkan barang yang dibelinya.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Skripsi yang pertama adalah penelitian yang dikerjakan oleh Maliah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*.” Penelitian ini dikerjakan oleh Maliah berfokus pada Peminjaman barang yang terjadi hanya secara lisan dan tidak menghadirkan saksi. Kemudian, barang tersebut dijadikan barang jaminan di Bank dengan sebuah perjanjian dan terkadang sampai jatuh tempo dan risikonya pun ditanggung oleh pemilik barang karena barang tersebut ditahan oleh pihak bank. Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan skripsi ini adalah jika penelitian ini lebih kepada meminjamkan barang pinjaman sedangkan pembahasan skripsi ini

lebih kepada akad peminjaman yang digantungkan dengan akad jual beli.<sup>61</sup>

Skripsi yang kedua adalah penelitian yang dikerjakan oleh Khoirun Ni'mah mahasiswi IAIN Tulungagung pada tahun 2017 dengan judul "*Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*". Penelitian yang dikerjakan oleh Khoirun Ni'mah ini berfokus kepada pinjam pakai motor yang terjadi di Desa Majan dimana si A meminta kepada si B untuk membuat perjanjian pinjaman, kemudian si B memberikan pinjaman kepada si A dengan syarat tambahan 10% dari setiap pinjaman. maka uang itu langsung dicairkan pada saat itu juga dengan objek jaminannya sebuah motor. Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan yang akan diteliti ini adalah jika penelitian Khoirun Ni'mah lebih kepada hutang yang terdapat syarat tambahan dan adanya objek jaminan sedangkan penelitian ini lebih kepada

---

<sup>61</sup> Maliah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*." (Skripsi Program Sarjana Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan, Lampung, 2017).

peminjaman suatu barang yang disyaratkan dengan akad jual beli.<sup>62</sup>

Skripsi yang ketiga adalah penelitian yang dikerjakan oleh Elis Mirensi mahasiswi IAIN Bengkulu pada tahun 2019 dengan judul “*Peminjaman Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam*”. Penelitian yang dikerjakan oleh Elis Mirensi ini meninjau mengenai adanya praktek peminjaman yang terjadi di desa Lingge. Adapun mekanisme praktik peminjamannya adalah si A meminjamkan bahan pokok yang dalam hal ini adalah sekarung beras kepada si B, kapanpun si B ini telah sanggup untuk mengembalikan pinjamannya si A malah melanggar perjanjian dengan setiap bulannya barang yang dipinjam oleh si B selalu ditambah. Pada awalnya si B hanya meminjam 2 karung beras kemudian si A setiap bulannya menambah 1 karung beras dan sampai si B sebagai peminjam mengembalikan barang yang dipinjamnya. Si B baru mengetahui kalau barang yang dipinjamnya menjadi ditambah hitungannya setelah si B mengembalikan barang tersebut kepada si A. hal tersebut membuat salah satu pihak rugi

---

<sup>62</sup> Khoirun Ni'mah, “*Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Jawa Timur, 2017).

karena adanya ketidaktahuan dari pihak B. adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah kalau penelitian yang dikerjakan oleh Elis Mirensi lebih kepada adanya kesalahan/kecurangan dari salah satu pihak di dalam perjanjian pinjaman beras sedangkan yang diteliti oleh di dalam skripsi ini lebih kepada penggantungan akad kepada akad yang lain.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Elis Mirensi, "*Peminjaman Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam*" (Skripsi Program Sarjana IAIN Bengkulu, 2019)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Cet X), Jakarta : Dewan Dakwah Islam, 1972.
- Abdul Wahab, Muhammad, *Fiqh Peminjaman*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Abdurrahman bin Hasan, *Al-Iman wa Al-Roddu'ala Ahli Al-bad'i*, Jilid 1, Riyadh : Darul 'Ashimah, 1992
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Darul Ihya Al-Kutubi Al-'Arabiyah.
- Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Kitab Al-Mushonif fii Al-Ahadis wa Al-Asar*, Juz 4, Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1988.
- Ahmad, Abu Abdurrahman, *As-Sunan Al-Kubra Linnisa'i*, Juz 5, Beirut : Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* , jilid. 6, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abu Bakar Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Juz 6, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrohman, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahibi Al-Arba'ah*, Juz 2, Kairo: Dar Al-Hadis, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (cet I), Jakarta: Sinar Grafika, 1994.



Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Naladana, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid. 2, Beirut: *Darul Ihya Al-Turatsi Al-'Arabi*

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri, 2012.

Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.

Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz zain*, Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001

Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Mua'amalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Rajawali, 2016

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Snnah* (jilid 13), Bandung : Alna'arif, 1997.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhrawardi, K Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: sinar Grafika, 2012.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

## **Jurnal**

Abdur Ghofur, Ruslan, “Kontruksi Akad dalam Pengembangan ProdukPerbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII No. 1, 3 Juni 2015.

Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhahib Al-Arba’ah”. *Jurnal Qowanin*, Vol. 02 No. 2 Juli 2018.

Muhammad Maksum, “ Model-Model kontrak dalam Produk Keuangan Syariah”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII No. 1, 1 Juni 2014.

Syamsul Hilal, “Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. X No. 1, 1 Januari 2011.

## Naskah Ilmiah

Elis Mirensi, “*Peminjaman Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi Program Sarjana IAIN Bengkulu, 2019.

Khoirun Ni'mah, “*Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Jawa Timur, 2017.

Maliah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Maulana, Hasanuddin, “*multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia*”. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 9 Desember 2010.

Rachmat Syafe'i, “*Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih*”. (Makalah disampaikan pada *acara Diskusi Hukum* yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018.

## Wawancara

Arsip, UD. Karya Mandiri Frozen Foods.

Imrondi, wawancara dengan peminjam gerobak, Pasar Panjang, Bandar Lampung, 30 November 2019.

Kamim, wawancara dengan pemilik, Kantor UD Karya Mandiri Frozen Foods, Bandar Lampung, 28 November 2019.

Rasyid, wawancara dengan peminjam gerobak, Prapatan Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, 30 November 2019.